

Vo. 2, No. 2, Agustus 2020

p-ISSN 2656-2383
e-ISSN 2656-0925



JURNAL KONSTITUEN

BERPIKIR KRITIS UNTUK MASYARAKAT DAN NEGARA YANG LEBIH BAIK
<http://www.ipdn.ac.id/FHTP>

Jurnal Konstituen merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Artikel yang diterbitkan jurnal ini melalui proses penilaian oleh *reviewer* yang telah dilakukan dalam *Open Journal System*.

**DEWAN REDAKSI JURNAL KONSTITUEN
BERBASIS *OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS)*
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2020**

Penanggungjawab

Dr. H. Romly Arsyad, SH., M.Hum

Redaktur

Prof. Dr. Muhammad Ilham, M.Si

Dr. H. Yana Sahyana, SH., M.Si

Dr. Rosmery Elsy, SH., M.Si

Penyunting/ Editor

Dra. Eva Evianny, M.Si

Sutiyo, S.STP., M.Si., Ph.D

Dr. Romi Saputra, S.Sos., M.Si

Mitra Bestari

Prof. Dr. Rukmana Amanwinata, SH., MH

Design Grafis

Drs. Agus Supriatna., M.Si

M. Hadiyat, S.Sos

Hagia Arsanti, SE

Melinda N. Lestari, S.STP., MM

Fotografer

Maris Gunawan Rukmana, S.IP., M.Si

Sulton Rohmadin, S.STP., M.Si

MGS. Ismail, S.Pd., M.Si

Timoty Yusuf Salama, S.STP

Udin, SE

Sekretariat

Dra. Hj. Nunung Royani., MM

Ismail, S.Pd., M.Si

Sugiatno, S.Sos., M.Si

Alamat Redaksi

Jln. Ir. Soekarno Km 20 Jatinangor Sumedang 45363
e-mail: hukum-tp@ipdn.ac.id
<http://www.ipdn.ac.id/FHTP>

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya. Jurnal ilmiah “konstituen” merupakan jurnal ilmiah perdana Fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN yang telah terbit baik dalam bentuk elektronik maupun cetak. Jurnal Ilmiah “Konstituen” ini secara substansial bermuatan artikel baik hasil penelitian maupun konsepsional sesuai dengan perspektif hukum tata pemerintahan dalam lingkup Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Praktik Perpolisian dan Tata Pamong; Keamanan dan Keselamatan Publik.

Pada Volume 2 No. 2 Tahun 2020 jurnal ini dimuat artikel yakni Pelaksanaan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kemungkinan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020); Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah; Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah; Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Covid-19.

Redaksi sangat menyadari tak ada gading yang tak retak, karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dalam kerangka perbaikan penerbitan dan edisi yang akan datang. Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada yang terhormat Rektor IPDN; Dekan Fakultas Hukum Tata Pemerintahan, Prof. Dr. Rukmana Amanwinata, SH., MH selaku Mitra Bestari dan para penulis artikel sehingga jurnal ini dapat terbit dengan baik.

Harapan redaksi dengan terbitnya jurnal “Konstituen” Jurnal Fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN ini dapat menambah khasanah pengetahuan terkait dengan aspek-aspek pada lingkup Hukum Tata Pemerintahan dan menjadi salah satu referensi yang dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu maupun pengetahuan para pembaca sekalian.

“Partijdigheid In De Wetenschap Is Denken Voor De Beschaving”

Redaksi,



JURNAL KONSTITUEN

BERPIKIR KRITIS UNTUK MASYARAKAT DAN NEGARA YANG LEBIH BAIK
<http://www.ipdn.ac.id/FHTP>

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	iv
♦ Pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kemungkinan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020)	69 -73
Fajar Muhandari, Muh. Ilham	
♦ Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	75 -87
Yana Sahyana	
♦ Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah	89-100
Murtir Jeddawi, Abdul Rahman	
♦ Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah	101-112
Danny Permana	
♦ Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Covid `19	113 -126
Rosmery Elsy	

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENANGANAN COVID `19

Rosmery Elsy

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

rosmerye8@gmail.com

Abstract

Covid Handling Policy 19 in West Java Province, the Governor of West Java in the implementation of its handling always refers to what is the policy of the central government, the policy of budget reconfusing carried out by the government towards the 2020 state budget, the provincial government also reconfuses the provincial and regency / regional budgets City, so that the policies undertaken to overcome the response of Covid 19 always rests on policies made by the central government. Because of the 19th Impact in Indonesia, it has been very serious and has spread in 34 provinces in Indonesia, and nearly 400 districts / cities in Indonesia. The policy of implementing phase 1 PSBB in Depok, Bogor and Bekasi, is an early stage PSBB, because in that area, is a buffer for the Capital City area of DKI Jakarta, where DKI Jakarta is the highest pandemic cluster in Indonesia, and most of the people of West Java, earn a living in Capital of DKI Jakarta. Relocating a budget for handling Covid 19 in West Java is budgeted to reach almost 8 trillion, and added budget relocation in several regencies / cities in West Java, to cope with handling Covid 19, is the seriousness of the local government in handling the Covid 19 problem in West Java. For this reason, researchers are interested in conducting research with the title "Policy Analysis of the Government of West Java Province in handling Covid 19" This study uses descriptive qualitative methods, by studying and analyzing and describing secondary data obtained by researchers and the results achieved are the Implementation of Government Policy West Java Province in handling Covid 19, went very well, and originally West Java was included in a group of 4 (four) major, now getting better and entering the ranks of the top 10 spread of Covid 19 in Indonesia, and some areas have entered the yellow zone and green zone, as well as the blue zone (this paper was released in early July 2020).

Keywords: Policy analysis, Government, West Java, Covid 19.

Abstrak

Kebijakan Penanganan Covid 19 di Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat dalam implementasi penanganannya selalu mengacu apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan reconfusing anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap APBN tahun anggaran 2020, pemerintah provinsi juga melakukan reconfusing anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, sehingga kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi penanggulangan covid 19 selalu berpijak kepada kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat. Karena Dampak covid 19 di Indonesia, sudah sangat serius dan menyebar penularannya di 34 provinsi di Indonesia, dan hampir 400 Kabupaten/Kota di Indonesia. Kebijakan pelaksanaan PSBB tahap 1 di Daerah Depok, Bogor dan Bekasi, merupakan PSBB tahap awal, karena di daerah tersebut, merupakan penyangga daerah Ibu Kota DKI Jakarta, dimana DKI Jakarta merupakan klaster pandemic tertinggi di Indonesia, dan sebahagian besar warga Jawa Barat, mencari nafkah di Ibu Kota DKI Jakarta. Merelokasi anggaran untuk penanganan covid 19 di Jawa Barat dianggarkan mencapai hampir 8 triliun, dan ditambah relokasi anggaran di beberapa Kabupaten/Kota se wilayah Jawa Barat, untuk menanggulangi penanganan covid 19, merupakan keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan permasalahan covid 19 di Jawa Barat. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid 19 " penelitian ini menggunakan metoda kualitatif deskriptif, dengan mengkaji dan menganalisis dan mendiskripsikan data-data sekunder

yang didapat oleh peneliti dan hasil yang dicapai adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid 19, berjalan sangat baik, dan semula Jawa Barat masuk dalam kelompok 4 (empat) besar, saat ini semakin membaik dan masuk jajaran 10 besar penyebaran covid 19 di Indonesia, dan beberapa daerah sudah masuk zona kuning dan zona hijau, serta zona biru. (tulisan ini dirilis pada awal bulan Juli tahun 2020).

Kata kunci: Analisis kebijakan, Pemerintah, Jawa Barat, Covid 19.

PENDAHULUAN

Musibah virus corona hampir diseluruh wilayah di Indonesia, penyebarannya sangatlah cepat, sehingga dampaknya sangat terasa sekali, dimana dampak social, ekonomi dan kesehatan, sangat dirasakan. Sehingga pemerintah harus melakukan pengambilan kebijakan yang sangat mendesak sekali dengan menganjurkan kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia, untuk dapat bekerja dari rumah, ibadah di rumah, dan sekolah dari rumah, kebijakan social distancing dan anjuran work from home yang dilakukan pemerintah adalah untuk mencegah penularan covid 19, agar dapat dikendalikan. Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan reconfiguring anggaran pemerintah, ini dilakukan adalah untuk memberikan ruang alokasi anggaran untuk penanganan biaya kesehatan bagi penanganan covid 19 di Indonesia, dimana pemangkasan dan perhitungan kembali alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah, pada APBN tahun anggaran 2020, dengan dikeluarkan dan ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), nomor 1 tahun 2020, terkait dengan Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, secara garis besar Perppu tersebut membahas dua hal yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional

dan/atau stabilitas sistem keuangan negara. (<https://www.kemenkeu.go.id/>, 17 Maret 2020).

Perkembangan Covid-19 yang sangat cepat, berdampak pada banyak aspek yaitu diantaranya aspek sosial dan ekonomi. Sehingga mengakibatkan penurunan di beberapa sektor diantaranya : industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan.

Penyebaran Covid-19 diseluruh dunia juga membuat situasi ekonomi dunia juga semakin memburuk dan tidak hanya terjadi di Indonesia beberapa lembaga memperkirakan akan terjadi perlemahan ekonomi dunia, antara lain International Monetary Fund (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus diangka 3%. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada bulan Maret 2020 tetap tumbuh positif walau ditengah pandemi Covid-19 yang terjadi, walau demikian pemerintah tetap selalu waspada terhadap dampak Covid 19 ini, (<https://sukabumiupdate.com/>, 17 April 2020).

Ekonomi Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh dikisaran minus 2% hingga 3% Menteri keuangan, Sri Mulyani juga memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 2,5% atau bahkan 0% jika pandemi ini tidak di atasi. Dengan berdampaknya penularan virus corona ini pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti berada di bawah 5%. Kondisi ini diperburuk juga dengan harga minyak dan gas yang turun di kisaran USD 30 per barel, padahal perekonomian Indonesia bergantung pada harga komoditas.

Berdampak juga kepada sektor pemerintahan, dimana terjadinya penurunan pendapatan Negara dan daerah yang diakibatkan adanya penurunan aktifitas ekonomi masyarakat, sementara terjadi peningkatan belanja pemerintah, khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial. Pada bulan pertama mungkin pandemi Covid-19 belum terlalu berdampak besar pada keuangan pemerintah, karena masih dapat memanfaatkan ketersediaan dana yang masih tersimpan. Namun apabila pandemi ini tidak kunjung membaik, dampak keuangannya akan mulai dirasakan pada beberapa bulan berikutnya karena adanya penurunan pendapatan yang tajam dan masalah likuiditas. Oleh karena itu instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun daerah, perlu mengerahkan kekuatan bersama dalam penanggulangan penyebaran pandemi ini dengan memprioritaskan anggaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial. Disaat yang sama pemerintah perlu menanggulangi dampak ekonomi dan keuangan, dengan target pada masyarakat yang terdampak karena menurunnya daya beli.

Data penyebaran Covid 19 di Provinsi Jawa Barat tahun 2020, 3 (tiga) bulan terakhir yaitu dari bulan April 2020, Bulan Mei 2020 dan Bulan Juni 2020, hingga awal bulan Juli tahun 2020, meliputi, bulan April 2020, dimana pandemic Covid 19 per tanggal 6 April 2020 terinfeksi kasus sebanyak 263 kasus; Sembuh sebanyak 13 orang, dan yang meninggal sebanyak 29 orang, seiring berjalannya waktu kasus terinfeksi Covid 19 di Provinsi Jawa Barat bertambah 1677 orang terinfeksi kasus covid 19, sembuh sebanyak 397 orang dan yang meninggal banyak 123 orang (data pertanggal 19 Mei 2020). Dan pada bulan Juni 2020 kasus terinfeksi sebanyak 2.805 orang, sembuh sebanyak 1.261 orang, meninggal 171 orang.

Dampak Covid-19 sangat berat dirasakan masyarakat Jawa Barat (Jabar). Malah sebagian besar industri terutama di kawasan Bekasi, Karawang, Purwakarta,

dan sekitarnya semakin tertekan dari waktu ke waktu karena pandemi ini. Menurut Kepala Divisi Stabilisasi Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jabar Rahmat Taufik, tekanan pada industri di Jabar sudah dimulai sejak akhir tahun 2019 akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Dengan pandemi ini, tekanan kepada dunia industri menjadi ganda. "Tekanan ke industri ini tidak hanya pada saat ada pandemi. Jawa Barat salah satu paling parah mendapat tekanan karena akhir tahun November, Desember 2019 ini perang dagang AS- China. Mengakibatkan laju ekonomi kita baru kita di bawah nasional, karena bahan baku beberapa masih bergantung ke luar negeri, termasuk China," ujar Rahmat di Kota Bandung, akhir pekan ini. Oleh karena itu, menurut Rahmat, Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat sudah membuat kajian. Yakni, dengan membuat strategi membuka ekonomi kembali lewat leveling atau membuat level kondisi sebaran Covid-19 yang ada di Jabar. "Ada berbagai treatment yang dilakukan baik pasar tradisional, industri, mal, ada kondisi yang harus dilakukan karena Pemerintah tak mungkin menahan terus dan mensubsidi," katanya. Menurutnya, Jabar harus belajar ke negara yang sudah membuka ekonominya. Seperti, Selandia Baru dan Jerman. "Kita berdamai dengan virus dengan disiplin menjaga jarak dan komitmen untuk melakukan ini," katanya. Rahmat menjelaskan, ketika skala wabah meningkat, banyak pelabuhan di China ditutup yang menghambat proses produksi, termasuk bahan baku untuk alat pelindung diri (APD). "Inilah juga yang mengakibatkan banyak PHK," kata Rahmat. Rahmat mengatakan, Jabar memegang peran strategis dalam menopang perindustrian nasional. Sebanyak 20 persen pabrik manufaktur Indonesia ada di Jawa Barat dan hampir sebagian besar manufaktur ini tujuannya ekspor. "Automotif, elektronik, tekstil, hampir semua di Jawa Barat," katanya.

Selain industri manufaktur, kata dia, pandemi juga berdampak pada pariwisata. Rahmat menjelaskan, Jawa Barat juga

merupakan daerah tujuan wisata. Sementara tempat wisata semua ditutup, sehingga berbagai sektor terdorong juga untuk mundur seperti kuliner, perhotelan, dan tenaga kerja lain yang ada di pariwisata. “Ini berakibat ke daya beli masyarakat di Jawa Barat. Mengakibatkan juga pangan terhambat, karena pasar induk mengurangi omzetnya, karena pasokannya juga berkurang,” kata Rahmat. Bahkan, kata dia, kondisi saat ini petani dan peternak pun kesulitan menjual komoditasnya karena tidak ada pembeli. “Mei (seharusnya) puncaknya panen. Padi harusnya panen, peternak sudah menyiapkan pula untuk panen di bulan puasa dan lebaran, peternak kesulitan menjual,” kata Rahmat. Namun, kata dia, ironi terjadi karena di tingkat produksi harga jatuh, tapi di tingkat konsumen harga tetap melambung tinggi. “Maka inflasi masih tinggi,” kata Rahmat.

Untuk meminimalisasi dampak dari tertekannya berbagai sektor industri dan pertanian, kata dia, Pemprov Jabar pun berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha dan pemerintah kota kabupaten. “Di sektor pangan kita masih melakukan berbagai koordinasi untuk penyerapan di sentra produksi, juga di berbagai pasar,” kata Rahmat. Sementara untuk masyarakat menengah/kecil, selain bansos dari pemerintah pusat, Pemda Prov Jabar bekerja sama dengan PT Pegadaian agar masyarakat tetap bertahan dan mengamankan asetnya. Pemda Provinsi Jabar juga mengeluarkan Bantuan Tidak Terduga untuk menyerap produk APD yang dibuat oleh UKM. “Ini membuat Jawa Barat juga daerah penghasil APD di masa pandemi ini, sekaligus sedikitnya menyelamatkan ekonomi,” kata Rahmat.

Sementara menurut Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II dan Manajemen Strategis Kantor Regional II Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lasdini Purwanti, kinerja keuangan perbankan Jabar triwulan I/2020 masih cukup baik, walaupun turun dibanding tahun lalu. “Tapi masih tumbuh kredit, kemudian juga DPK dan aset masih ada

pertumbuhan di Triwulan I ini. Kemudian kita harap tidak terlalu turun karena sudah ada berbagai stimulus yang dikeluarkan pemerintah, yang ditindak lanjuti juga oleh peraturan-peraturan OJK,” kata Lasdini. Sementara NPL, menurut dia, masih terjaga karena adanya kebijakan restrukturisasi, dimana untuk kreditur yang mengajukan restrukturisasi diangkap kategori lancar. Sehingga perhitungan NPL tidak seketat sebelum ada pandemi. “Jadi meskipun ada penurunan dibanding tahun lalu, cuma masih terjaga,” katanya. Menurut Direktur Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi, Kepala Kantor Perwakilan BI Jabar Pribadi Santoso menuturkan, dampak Covid-19 cukup multidimensi. Laju pertumbuhan ekonomi Jabar yang biasanya maju di angka 5 persen bahkan di atas nasional, namun pada triwulan I/2020 LPE-nya ada diangka 2,73 persen. “Sementara nasional 2,97 persen, penyusutannya lumayan dalam, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Ini akan berpengaruh pada income, daya beli masyarakat juga, termasuk dunia usaha, saya kira semua terpengaruh,” katanya.

Menurutnya, upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat kurang mampu, di antaranya melalui bansos. Kedua, menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi dalam physical distancing, yakni menghidupkan pasar jual beli secara online bekerja sama dengan fintech. “Kami juga meng-onlinekan pasar tradisional, dengan bekerjasama dengan kepala dinas terkait pasar. Contoh kemarin pasar Cikurubuk online di Tasikmalaya, agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tapi dilakukan secara higienis,” kata Pribadi. Ketiga, kata dia, BI harus menjaga ketersediaan uang kartel yang higienis juga. “Jadi uang yang keluar dari ATM dari kasir perbankan sudah dikarantina. Jadi ada uang masuk 14 hari harus diam dulu, tidak disentuh. Jadi uang kartel waktu diedarkan ke masyarakat sudah melalui proses sehingga virus diharapkan sudah mati,” katanya. Terakhir, kata dia, menyiapkan industri atau usaha yang kemarin tutup ketika dibuka bisa

langsung bisa beroperasi lancar, terutama UMKM. Harus dipastikan ketika PSBB dibuka unit usaha bisa langsung digerakan. "Kami sedang jajaki pilot projek terkait pengadaan gudang di daerah produsen, dan kota konsumen. Pemasoknya bisa didaerah dan konsumen di kota-kota. Sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan meski belum ideal,"(sumber: <http://www.ayobekasi.net/read/2020/05/18/6152>, yang peneliti kutip dari Republika.co.id).

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah, terkait permasalahan ini dengan judul "Penanggulangan Penanganan Covid 19 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat"

Indetifikasi Masalah

1. Dampak covid sangat dirasakan oleh warga masyarakat di Jawa Barat;
2. Dampak covid, warga masyarakat harus melakukan kegiatan, tetap tinggal dirumah, semua dikerjakan dari rumah;
3. Adanya kebijakan pelaksanaan Pembatasan Berskala Besar yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Lumpuhnya perekonomian warga masyarakat, disebagian besar wilayah Jawa Barat;
5. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dengan keterbatasan waktu yang peneliti miliki, peneliti membatasi dalam penelitian yang peneliti tulis, dengan mengkaji dan menganalisis dari Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penanganan Covid 19 di Provinsi Jawa Barat "

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti lakukan hanya sebatas, dimana peneliti ingin mengetahui dan mengkaji dan mendiskripsikan terkait dengan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penanganan Covid 19 di Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 195) menjelaskan bahwa: Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008: 196) menjelaskan bahwa: Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Berdasarkan rumusan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan diatas, maka implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008: 196) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan

diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Model Implementasi Kebijakan Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu: pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari terdapat perbedaan-perbedaan sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya dua pendekatan ini bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 142) menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil.
2. Sumber Daya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
3. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4. Sikap/ Kecendrungan (*disposition*) para pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja

implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karena itu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

Menurut Grindle dalam Agustino (2008:192) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu:

1. Isi Kebijakan (*content of policy*) Variabel isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, Jenis manfaat yang diterima oleh target group, Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan, Apakah letak dari sebuah program sudah tepat, Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci dan Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya manusia.
2. Lingkungan Implementasi (*conteks of policy*) Variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa dan Tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran. Kebijakan Publik Kinerja Kebijakan Publik Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana implementor Karakteristik dari agen pelaksana implementor Aktivitas implementasi dan komunikasi sangat organisasi Kondisi ekonomi, sosial dan politik Sumber Daya Standar dan Tujuan.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebastier dalam Agustino, (2008: 196) terdapat tiga kelompok variabel yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*) Kelompok variabel karakteristik masalah mencakup: a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah

yang bersangkutan; b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan d).Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan.

2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) Kelompok variabel karakteristik kebijakan/ undang-undang mencakup: a) Kejelasan isi kebijakan; b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut; d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
 - b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
 - c) Sikap dari kelompok pemilih; dan
 - d). Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Oxford english dictionary mendefinisikan kinerja sebagai: "The accomplishment, execution, carrying out, working out of anything ardered or undertaken", dari definisi tersebut kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu tindakan, tugas atau operasi yang dilakukan oleh orang, kelompok orang atau organisasi (Purwanto,2012: 99).

Kinerja dengan demikian dapat merujuk keluaran (output), hasil (outcome) atau pencapaian (*accomplishment*). Jika dikaitkan dengan kebijakan, kinerja suatu kebijakan

dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan. Baik itu berupa keluaran kebijakan (*policy output*), maupun hasil kebijakan (*policy outcome*). Dalam menentukan tinggi-rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan maka penilaian terhadap kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu yang penting.

Penilaian terhadap kinerja adalah penerapan metode yang dipakai oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi, yaitu:

- (1) apa isi dan tujuan dari suatu kebijakan;
- (2) apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut: dan
- (3) apakah setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan implementasi yang dijalankan tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak.

Indikator Pengukuran Kinerja

Untuk dapat membuat justifikasi apakah suatu kebijakan gagal atau berhasil maka seorang peneliti perlu melakukan penilaian terhadap kinerja kebijakan tersebut. Alat bantu yang dapat dipakai oleh seorang peneliti untuk dapat menilai baik atau buruknya kinerja implementasi suatu kebijakan disebut sebagai indikator. Dalam kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan. Dengan adanya indikator maka peneliti dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, program atau proyek. Sebagai alat ukur, indikator dapat bersifat kualitatif (naratif) maupun kuantitatif (angka). Angka atau deskripsi tersebut sangat berguna dalam menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Indikator yang baik akan membantu peneliti mengenali kondisi yang akan muncul ketika tujuan suatu kebijakan dapat diwujudkan.

Ciri-ciri indikator yang baik dalam teori kebijakan publik sebagaimana dijelaskan Purwanto (2012: 104) antara lain:

- a. Memiliki relevansi dengan kebijakan atau program yang akan dievaluasi. Hal ini sangat jelas, indikator yang baik mesti mencerminkan realitas kebijakan dan program.
 - b. Memadai, dalam arti jumlah indikator yang digunakan memiliki kemampuan menggambarkan secara lengkap kondisi tercapainya tujuan suatu kebijakan.
 - c. Data yang diperlukan mudah diperoleh dilapangan sehingga tidak akan menyulitkan evaluator.
 - d. Indikator yang disusun idealnya bersifat general dan representatif serta dapat dibandingkan dengan kebijakan yang sama ditempat lain.
3. Indikator keluaran Kebijakan Sebagaimana telah disebutkan dalam kerangka logis pengukuran kinerja implementasi suatu kebijakan didepan, indikator utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu: indikator output dan indikator outcome. Indikator output digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Untuk mengetahui kualitas hasil kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran, maka evaluator dapat merumuskan berbagai indikator.

Menurut Purwanto (2012: 105) langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi *policy output* dari suatu kebijakan atau program yang akan dievaluasi.
- b. Mengidentifikasi kelompok sasaran kebijakan atau program, apakah kelompok sasaran tersebut individu, keluarga, komunitas dan lain-lain.

- c. Mengidentifikasi frekuensi kegiatan penyampaian output yang dilakukan oleh implementer.
- d. Mengidentifikasi kualitas produk yang disampaikan oleh implementer kepada kelompok sasaran. Secara umum apabila kebijakan atau program yang ingin dievaluasi tersebut merupakan kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung melalui instrumen material seperti pelayanan gratis, subsidi, hibah dan lain-lain.

Terkait Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melindungi, adanya permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat merasakan terbantu didalam mengatasi permasalahan dimaksud, penanggulangan biasanya, proses kegiatan yang dilakukan setelah adanya sebab akibat dari suatu bencana yang timbul, baik bencana bersifat local maupun bencana bersifat nasional dan international. Penanggulangan bencana biasanya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dengan adanya bencana alam atau bencana kesehatan yang menimpa masyarakat, sehingga pemerintah wajib untuk menanggulangnya.

Terkait Penanganan covid 19.

Penanganan covid 19, protokol kesehatan jika anda merasa tidak sehat :

1. Jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria:
 - a. Demam 38 derajat Celcius, dan
 - b. Batuk/pilek istirahatlah yang cukup di rumah dan bila perlu minum Bila keluhan berlanjut, atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)

Pada saat berobat ke fasyankes, Anda harus lakukan tindakan berikut:

- a). Gunakan masker
 - b). Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan
 - c). Usahakan tidak menggunakan transportasi massal.
2. Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes akan melakukan screening suspect COVID-19:
 - a. Jika memenuhi kriteria suspect COVID-19, maka Anda akan dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan COVID19.
 - b. Jika tidak memenuhi kriteria suspect COVID-19, maka Anda akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter fasyankes.
 3. Jika anda memenuhi kriteria Suspect COVID-19 akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulans fasyankes didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri (APD).
 4. Di RS rujukan, akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi.

Covid 19 adalah wabah virus yang menyerang manusia melalui kontak langsung antara manusia, adapun gejala yang ditimbulkan adalah adanya batukbatuk dan influenza dan demam tinggi diatas 37 derajat, hingga menyerang pernapasan manusia, Covid 19, masuk ke Indonesia sejak awal bulan maret, dimana adanya warga masyarakat terinfeksi Covid 19, lalu menularkan kebeberapa daerah di Indonesia, basis penularan berada di DKI Jakarta, menjadi pandemic covid 19, yang penularannya sangat cepat, lalu masuk kedaerah Jabodetabek, dimana wilayah ini adalah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta,

sehingga penyebaran di daerah sangat cepat, dengan adanya penyebaran yang sangat cepat pemerintah melakukan kebijakan untuk melakukan *social distancing* dan *physical distancing*, serta kebijakan untuk warga masyarakat untuk belajar di rumah, bekerja dari rumah, ibadah di rumah, serta melakukan PSBB tahap I, di beberapa wilayah yang terkena pandemic Covid 19, Pemerintah provinsi Jawa Barat, yang wilayahnya terdampak covid 19, berada di daerah wilayah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, antara lain Depok, Bogor dan Bekasi, untuk PSBB tahap awal dilakukan di Daerah ini, dikarenakan covid semakin meluas, maka yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat adalah dengan melakukan PSB di Wilayah Kota Cimahi, dan PSBB di Bandung Raya, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasik Malaya.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian adalah serangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mengetahui dan mendapatkan informasi dan data-data pendukung yang dapat dipergunakan untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah, atau analisis atas hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut pendapat Arikunto (2010:3), Penelitian diskriptif adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki keadaan, atau hal-hal yang berkaitan dengan hasil yang dipaparkan dalam bentuk laporan hasil penelitian”.

Penelitian diskriptif membuat deskripsi tentang gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta yang ada di lapangan secara empirik, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis induktif. Hal ini terkait belum jelasnya permasalahan dan bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna.

Menurut Sugiyono (2011:245) “ Analisis data kualitatif adalah bersifat Induktif “ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasar kepada pengetahuan khusus, dengan didukung oleh fakta-fakta yang unik, dan dirangkai untuk dijadikan solusi pemecahan masalah secara umum. Konklusi peneliti yang ditarik dari cara berpikir semacam ini ditempuh dengan jalan induktif.

Dalam penelitian kali ini, peneliti mengkaji dan menganalisis serta mendeskripsikan data-data yang peneliti dapatkan dari data sekunder, yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020. Terkait dengan Kebijakan Relokasi Anggaran APBN dan APBD, dimana adanya penyesuaian Belanja dan Pembiayaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta kebijakan terhadap fiscal secara nasional.

Data-data yang peneliti dapatkan dari penjelasan Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19 dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Serta melakukan Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan melihat dan mendatangi daerah-daerah yang terdampak Covid 19 dengan protokol kesehatan, diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung sekitarnya. Untuk melihat secara langsung kondisi disaat diberlakukannya PSBB tahap 1 dan tahap 2 serta PSBB tahap 3, dan PSBB transisi di beberapa zona hijau, di provinsi Jawa Barat serta penyesuaian dengan kebiasaan baru (new normal) yang akan diberlakukan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi Jawa Barat. Data tersebut peneliti jadikan bahan analisis dan kajian untuk dapat dideskripsikan sebagai tulisan ilmiah dalam tulisan kali ini.

HASIL DAN BAHASAN

Covid 19 terdampak di Provinsi Jawa Barat, awalnya adalah di daerah Depok, Bogor dan Bekasi, dimana daerah tersebut termasuk daerah penyangga Ibu Kota

DKI Jakarta, pada saat itu DKI Jakarta, merupakan wilayah pandemic virus corona, yang terdampak sangat tinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Sebahagian besar warga Depok, Bogor dan Bekasi, merupakan warga yang mencari nafkah di daerah DKI Jakarta, sebagai pegawai swasta, pegawai negeri (PNS) dan tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi di DKI Jakarta, serta buruh-buruh di beberapa pabrik yang berada di wilayah DKI Jakarta, sehingga 3 daerah tersebut di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdampak awal penularan Covid 19 di Provinsi Jawa Barat, hampir rata-rata penduduk Jawa Barat yang bekerja di DKI Jakarta terkena penularan virus corona, sehingga virus corona menyebar keseluruh wilayah provinsi di Jawa Barat, banyaknya hilir mudik warga masyarakat Jawa Barat, yang melakukan kegiatan, sehingga begitu cepat wabah penyeberan sampai di wilayah Jawa Barat, di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, sehingga kebijakan pemerintah Jawa Barat, akhirnya melakukan PSBB di Beberapa wilayah seperti PSBB di wilayah Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Garut dan Tasikmalaya, dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan PSBB ini, maka penularan Covid 19, dapat dihambat, dengan warga masyarakat melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Angka penularan covid 19 di Provinsi Jawa Barat tergolong semula masuk 4 besar, secara bertahap dengan kebijakan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota se Jawa Barat, maka posisi tersebut mulai menurun menjadi posisi dibawah 5 besar di Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Provinsi Jawa Barat

1. Melakukan refocusing anggaran APBD, dengan menyediakan atau mengalokasikan anggaran penanganan covid di provinsi di Jawa Barat sebesar, 8 triliun, ditambah dengan relokasi anggaran dimasing-masing APBD Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Melakukan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) di beberapa Kabupaten/kota terdampak covid 19, secara terpadu, sehingga berdampak adanya penutupan ruang-ruang gerak warga masyarakat di Jawa Barat : misalnya selama pandemic belum selesai dan diberlakukannya PSBB ditutup daerah-daerah wisata di seluruh Provinsi di Jawa Barat, baik wisata budaya, wisata kuliner dan wisata alam dan wisata kunjungan kekebon binatang di Jawa Barat, serta wisata-wisata lain, sehingga berdampak kepada aktifitas warga masyarakat, dan berdampak kepada aktifitas kegiatan ekonomi warga masyarakat.
3. Menutup untuk sementara waktu tempat-tempat ibadah bagi daerah-daerah zona merah terdampak covid 19,
4. Menutup semua sekolah dan perguruan tinggi di Jawa Barat, dimana pendidikan dianjurkan dan dilaksanakan secara daring dari rumah, sehingga aktifitas pendidikan berjalan tetapi dilakukan dari rumah, untuk semua pendidikan di provinsi di Jawa Barat.
5. Menyiapkan rumah-rumah sakit, sebagai rumah sakit rujukan covid 19 di provinsi di Jawa Barat, di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Penutupan aktifitas pertokoan, termasuk pasar-pasar tradisional di Jawa Barat, khususnya di daerah zona merah, dan mengawasi aktifitas warga masyarakat dengan bantuan dari TNI, POLRI dan SATPOL PP di seluruh wilayah di provinsi di Jawa Barat.
7. Melakukan pemeriksaan rapid test secara massal di beberapa wilayah-wilayah zona merah, zona kuning di wilayah provinsi Jawa Barat, dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan dan para donator-donatur yang memberikan bantuannya dalam penanggulangan penanganan covid 19 di wilayah Jawa Barat.
8. Memberikan bantuan sembako, bagi warga masyarakat yang terdampak covid 19, di beberapa wilayah di Kabupaten/

Kota bekerjasama dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat;

9. Melakukan evaluasi secara intens atas pelaksanaannya.

Beberapa bantuan diterima oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dari para donator yang turut serta berpartisipasi dalam penanganan covid 19 diprovinsi Jawa Barat jelas Kang Emil sebutan yang akrab bagi Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Barat mengapresiasi bantuan berupa Alat kesehatan, bahan pokok, uang tunai dari masyarakat, baik perorangan, yayasan, maupun perusahaan, untuk penanggulangan Covid -19. Bantuan yang terus mengalir dari waktu ke waktu itu memperlihatkan kepedulian masyarakat membantu sesama di tengah pandemi Covid -19 “Kalau boleh di luar itu kami mohon kepada (donatur) yang mampu untuk berpartisipasi dalam bentuk pikiran, gagasan, sumbangan ketenagaan, kesukarelawanan dan apapun itu,” kata Ridwan Kamil yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jabar dalam rilisnya di Bandung, Jumat (1/5/2020). Kang Emil sapaan Ridwan Kamil menyaksikan Ketua Umum Jabar Bergerak Atalia Ridwan Kamil menerima sejumlah bantuan, baik berupa Alat Pelindung Diri (APD), pangan, dan uang tunai. Bantuan tersebut berupa 5 unit desinfektan chamber dari PT Taspen (Persero) KCU Bandung, Alat Pelindung Diri (APD) penanganan Covid -19 senilai Rp500 juta dari Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jabar, uang tunai sebesar Rp350 juta dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV (PTS) Jabar, 30.350 dus susu pertumbuhan dari Danone, dan 25 ton beras dari PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (Eco Racing).

Gubernur Jabar mengapresiasi bantuan berupa Alat kesehatan, Jabar terima bahan pokok, uang tunai dari masyarakat, baik perorangan, yayasan, maupun perusahaan, untuk penanggulangan Covid -19. Ketua Umum Jabar Bergerak Atalia Ridwan Kamil mengatakan kontribusi para donatur,

khususnya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV yang menganggarkan dana bantuannya untuk mahasiswa terdampak yang kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring, karena terhambat koneksi internet. “Alhamdulillah hari ini banyak sekali bantuan ada Alkes, susu pertumbuhan, dan yang paling menarik ini ada dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, artinya dari kampus-kampus juga mereka udunan, mereka iuran untuk membantu masyarakat Jawa Barat termasuk juga Banten,” ucap Atalia. “Karena mahasiswa sekarang banyak sekali yang terdampak, mereka banyak yang harus kos, harus mendapatkan mata kuliah dan ujian melalui daring, sehingga mereka memang butuh sekali bantuan dari masyarakat lain,” tambahnya. (sumber: <http://brt.st/6yQN>, yang ditulis oleh Bernardus Wijayaka “ Jabar Bergerak Kembali Terima Bantuan Penanggulangan).

Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB Tahap I, Tahap II dan Tahap III, serta PSBB transisi, maka pemerintah provinsi Jawa Barat melakukan beberapa kebijakan dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah pusat, yaitu melakukan kebiasaan baru (new normal) dengan membuka beberapa kegiatan warga masyarakat di provinsi Jawa Barat, khususnya kegiatan ekonomi warga masyarakat jawa barat, dengan membuka pertokoan, mall, pasar-pasar tradisional dan tempat-tempat wisata, dengan tetap melakukan protokol kesehatan, dan membatasi jam kunjungan serta jumlah pengunjung hanya berkisar 50 %, secara bertahap, dan membuka rumah-rumah ibadah kembali dengan jumlah pengunjung yang beribadah diatur secara bergantian tidak berdesak-desakan atau tetap menjaga jarak disaat beribadah. Kebijakan ini sangat dirasakan oleh warga masyarakat di wilayah provinsi jawa barat, sehingga kegiatan ekonomi warga masyarakat terlihat mulai menggeliat dan secara perlahan tumbuh kembali. Namun apabila ditemukan adanya warga masyarakat yang terinfeksi

virus corona kembali, maka lokasi tersebut ditutup selama 3(tiga) hari untuk dilakukan sterilisasi dengan dilakukan penyemprotan desinfektan oleh petugas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Serta di daerah-daerah keramaian tersebut dijaga dan diawasi oleh aparat TNI, POLRI dan SATPOLPP untuk melakukan pengawasan dalam implementasinya. Semua ini dilakukan guna mencegah adanya warga masyarakat atau pemilik tempat-tempat usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan standar dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Dengan penerapan kebiasaan baru di provinsi di Jawa Barat, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, diharapkan adanya pengurangan angka penularan covid 19, warga masyarakat dapat beraktifitas kembali di era new normal, perekonomian masyarakat dapat berjalan kembali dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan positif di Jawa Barat.

SIMPULAN

Atas dasar penjelasan tersebut diatas. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, apa-apa yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat, bersama-sama pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat bersama-sama tim gugus tugas pengendalian penanganan Covid 19, dan dibantu oleh aparat keamanan TNI, POLRI dan SAT POL PP, berjalan dengan baik, sehingga penekanan angka penularan covid 19 di Jawa Barat dapat dikendalikan, dan beberapa daerah saat ini, masuk kepada wilayah zona hijau, seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, dan beberapa Kabupaten/Kota dimana angka penularannya dibawah angka 10, sehingga semua dapat dikendalikan, dengan penerapan kebiasaan baru (new normal), diharapkan, masyarakat dapat beraktifitas kembali seperti biasa tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, karena mereka beraktifitas dalam suasana masih adanya pandemic virus corona, saat ini. Warga masyarakat

di Jawa Barat, sangat berkontribusi dalam pelaksanaan PSBB tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, serta PSBB transisi menuju adaptasi kebiasaan baru (new normal), sehingga pemerintah provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota, saat ini bersama dengan dinas-dinas terkait mulai membuka kembali kantor-kantor dinas, dengan membatasi pengunjung yang datang, di setiap kantor, bagi yang berusia, diatas 50 tahun keatas, disarankan untuk tetap bekerja dari rumah, dan beraktifitas tetap dirumah, serta pemerintah belum mengizinkan untuk beroperasi kembali sekolah-sekolah baik sekolah dasar sampai perguruan tinggi se Jawa Barat, hal ini sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan tahun ajaran baru, pendidikan masih dilaksanakan dari rumah dengan system daring (*on line*), pada proses pembelajaran. Dan lokasi-lokasi tempat ibadah juga masih beroperasi dengan cara membatasi warga masyarakat yang berkunjung, dalam arti beribadah secara bergantian dengan menjaga jarak satu dengan yang lain, termasuk pertokoan, mall-mall dan pasar tradisional dibatasi jam operasionalnya, dan warga masyarakat yang berkunjung diwajibkan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Bisa saja daerah yang tadinya sudah masuk zona hijau, akan menjadi zona kuning atau merah, jika adanya warga masyarakat yang terinfeksi virus corona meningkat di wilayah itu, bahkan angkanya naik secara signifikan.

SARAN

Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat, sudah sangat baik, dalam menanggulangi penanganan pandemic covid 19 di provinsi Jawa Barat, namun walaupun sudah berjalan secara bersinergis, perlu diperhatikan dan diawasi unit-unit yang bertanggungjawab, dalam penanganan covid 19, agar penanganannya dapat sesuai dan dipertanggungjawab secara akuntabel, baik dana-dana yang diterima dari para donator, dan dana-dana yang bersumber

dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa barat.

Khususnya penyaluran bantuan-bantuan yang harus disampaikan kepada warga masyarakat dan institusi kesehatan yang berjuang didalam mengatasi wabah covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto (2010-265) Teknik pengumpulan data atau metode observasi

Arikunto (2010-3) metode penelitian diskriptif.

Sugiyono (2011:245) “ Analisis data kualitatif

Sugiyono (2011:222) yang menjadi instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif

Sugiyono (2011: 233) “ Tujuan dari wawancara semi terstruktur

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020.

Data Gugus Tugas Pengendalian dan Penanganan Covid 19 di Jawa Barat.

<https://sukabumiupdate.com/>, 17 April 2020).

<http://brt.st/6yQN>, yang ditulis oleh Bernardus Wijayaka

<http://www.ayobekasi.net/read/2020/05/18/6152>, Republika.co.id.